STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-228-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	24 MEI 2022
	TANGGAL REVISI	25 JUNI 2024
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,** **RAZILU** **NIP 196511281991031002**
	NAMA SOP	**USULAN RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara 3. Keputusan Presiden nomo 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit masing-masing 2. Memahami Keputusan tentang organisasi dan tata kerja 3. Memahami prosedur penyusunan Rancangan Keputusan Menteri
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP reviu Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Teknis terkait lainnya	1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis 3. Jaringan Internet 4. Faxmile
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak dapat memiliki kebijakan terkait substansi sebagai payung hukum	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-228-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	25 JUNI 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
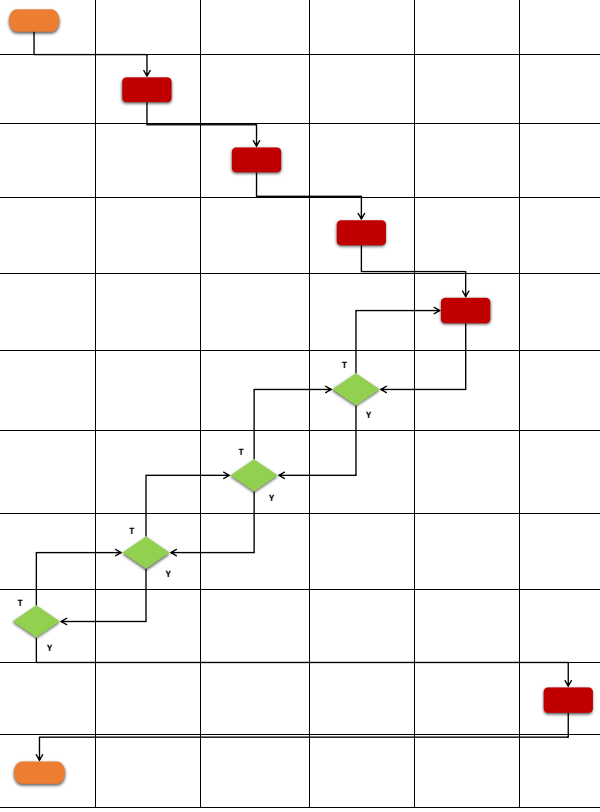
No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		KEPALA BPSDM	SEKRETARIS BPSDM	KABAG. PROGRAM DAN PELAPORAN	KETUA TIM KERJA	TIM KERJA	TATA USAHA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala BPSDM menugaskan Sekretaris untuk membuat usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.							Nota dinas	1 jam	Disposisi	
2	Sekretaris menugaskan Kepala Bagian untuk menindak lanjuti usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.							Nota dinas	30 menit	Disposisi	
3	Kepala Bagian menugaskan Ketua Tim Kerja untuk membuat Konsep Surat Usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.							Nota dinas	30 menit	Disposisi	
4	Ketua Tim Kerja membuat Konsep Surat Usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan meneruskan kepada Tim Kerja untuk mengedit dan memproses konsep Surat Usulan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.							Disposisi	1 jam	Konsep Surat	
5	Tim Kerja mengedit dan memproses Konsep Surat Usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan menyerahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan.							Konsep Surat	1 jam	Draft Surat	
6	Ketua Tim Kerja memeriksa Surat Usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, jika YA akan diberikan persetujuan dan diteruskan kepada Kepala Bagian, jika TIDAK akan dikembalikan kepada Tim Kerja untuk diperbaiki.				T / Y			Draft Surat	30 menit	Draft Surat disetujui/ditolak	
7	Kepala Bagian memeriksa Surat Usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, jika YA akan diberikan persetujuan dan diteruskan kepada Sekretaris, jika TIDAK akan dikembalikan kepada Ketua Tim Kerja untuk diperbaiki.			T / Y				Draft Surat	30 menit	Draft Surat disetujui/ditolak	
8	Sekretaris memeriksa Surat Usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, jika YA akan diberikan persetujuan dan diteruskan kepada Kepala BPSDM untuk ditandatangani, jika TIDAK akan dikembalikan kepada Kepala Bagian untuk diperbaiki.		T / Y					Draft Surat	30 menit	Draft Surat disetujui/ditolak	
9	Kepala BPSDM memeriksa Surat Usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, jika YA akan diberikan persetujuan dan ditandatangani dan diteruskan kepada Tata Usaha untuk didistribusikan dan diarsipkan.	T / Y						Surat	60 menit	Surat disetujui/ditolak	
10	Tata Usaha mengirimkan Surat Usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM kepada Biro Perencanaan melalui laman Sisumaker, mengarsipkan dan melaporkan kepada Kepala BPSDM.							Surat ditandatangani	30 menit	Surat terkirim	
11	Kepala BPSDM menerima laporan dari Tata Usaha perihal pendistribusian dan pengarsipan Surat Usulan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.							Laporan Surat Terkirim	30 menit	Laporan diterima